

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniannya-NYA, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2017 dapat diselesaikan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh menuju terwujudnya good governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat, disisi lain lamporan akuntabilitas juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) ini, memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2017 yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017. Pengukuran pencapaian output sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai selama kurun waktu 2017. Dengan demikian akan terlihat seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan/pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2017.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2017, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh pada tahun-tahun selanjutnya.

Demikian Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Banda Aceh, kami berharap bermanfaat bagi Pemerintah Kota dan pihak terkait lainnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banda Aceh

FAISAL, M.S.STP

Pembina Tk.I

NIP. 19780101 199810 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Aspek Strategi Organisasi	10
1.2. Isu –Isu Strategis	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
2.1. Renstra Badan Kesbang, Pol, dan Linmas Kota Banda Aceh ...	28
2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2016	38
2.3. Perjanjian Kinerja	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	50
3.1. Capaian Kinerja	51
3.2. Realisasi	63
BAB IV PENUTUP	67
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Rencana Strategik (Formulir RS)	
2. Perjanjian Kerja	
3. Rencana Kinerja Tahunan (Formulir RKT)	
4. Pengukuran Kinerja (Formulir PK)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2017, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh yang mendukung terwujudnya good governance berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dicabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis tersebut mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2012 – 2017 dengan Visi yang hendak dicapai adalah "Terwujud Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Berwawasan Kebangsaan menuju Banda Aceh Model Kota Madani". Sedangkan Misi yang diemban adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja aparatur yang Profesional
2. Membina Kesadaran Pentingnya Lingkungan Masyarakat Yang Tertib Dan Aman.
3. Membina Kesadaran Berbangsa dan Bernegara serta Kerukunan Beragama Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Membina Kesadaran Berpolitik Berdasarkan UUD 1945 Dan Pancasila.

Untuk dapat mencapai visi dan misi, maka ditetapkan beberapa tujuan dan sasaran. Tujuan yang ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan efektifitas dan profesionalisme kerja

2. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan semua instansi dan lembaga lain dalam rangka memantapkan dan memelihara keamanan dan kenyamanan
3. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam Berwawasan Kebangsaan
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembinaan dibidang Politik dan organisasi kemasyarakatan

Sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Terlaksananya kegiatan kantor dengan efektif dan profesional
2. Peningkatan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat
3. Peningkatan pemahaman masyarakat akan bahaya Minuman keras dan narkoba
4. Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam membina kerukunan beragama
5. Peningkatan Pemahaman masyarakat pentingnya wawasan berkebangsaan
6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan partai politik
7. Pelaksanaan pemilu/pilkada damai

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pada tahun 2017 antara lain pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai jadwal yang telah ditetapkan, kurangnya koordinasi dengan lembaga terkait, kurangnya sarana dan prasarana, serta adanya kekosongan jabatan struktural yang menghambat dinamika organisasi. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain mengintensifkan pelaksanaan kegiatan sampai selesai sebelum tutup tahun anggaran, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan lembaga

terkait, mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada, serta optimalisasi pembagian tugas seluruh staf yang ada.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banda Aceh

FAISAL, M.S.STP

Pembina Tk.I

NIP. 19780101 199810 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu SKPK Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik secara eksplisit tercantum dalam RPJP Kota Banda Aceh 2007-2027 dan secara implisit kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk penyelenggaraan program Kesatuan Bangsa dan Politik dinyatakan dalam RPJMD.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat mutlak bagi setiap Instansi pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Semangat Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintahan, telah menumbuhkan kembangkan perubahan etos kerja yang lebih dinamis dan strategis menuju kearah yang lebih baik. Semangat reformasi birokrasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan memperhatikan tujuan terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan optimalisasi pelayanan publik.

Dalam era desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut lebih responsif melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang

memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah. Oleh karena itu pengembangan dan penetapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sangat diperlukan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap tingkatan instansi pemerintahan.

Sebagai sebuah organisasi, instansi pemerintah dituntut untuk menyampaikan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya yang telah dilaksanakan selama satu tahun berjalan. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi terhadap capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan dan harus dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sebagai media pelaporan kinerja tahunan pemerintah

daerah maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, merupakan LAKIP tahun kelima dari Renstra tahun 2012-2017, dan sekaligus menjadi penilaian atas capaian kinerja selama 1 (satu) tahun.

Uraian LAKIP ini terdiri dari penetapan indikator kinerja sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh periode 2012-2017 yang telah mendapat dukungan pembiayaan dari APBK pada tahun 2017 serta menganalisa capaian kinerja pada tahun 2016 pada tingkat sasaran yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh periode 2012-2017.

1.1. Aspek Strategis Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Banda Aceh, merupakan satuan kerja perangkat kota yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, serta Peraturan Walikota Banda Aceh Nomo 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik,

1.1.1. Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Masyarakat;
 - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- (3) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
 - a. Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pengembangan Budaya serta Etika Politik; dan

- b. Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
- (5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 - b. Subbidang Organisasi Masyarakat.
- (6) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
 - a. Subbidang Penanganan Konflik Sosial; dan
 - b. Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis, Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategis.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1.1.2.1. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dibentuk Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

1.1.2.2. Fungsi

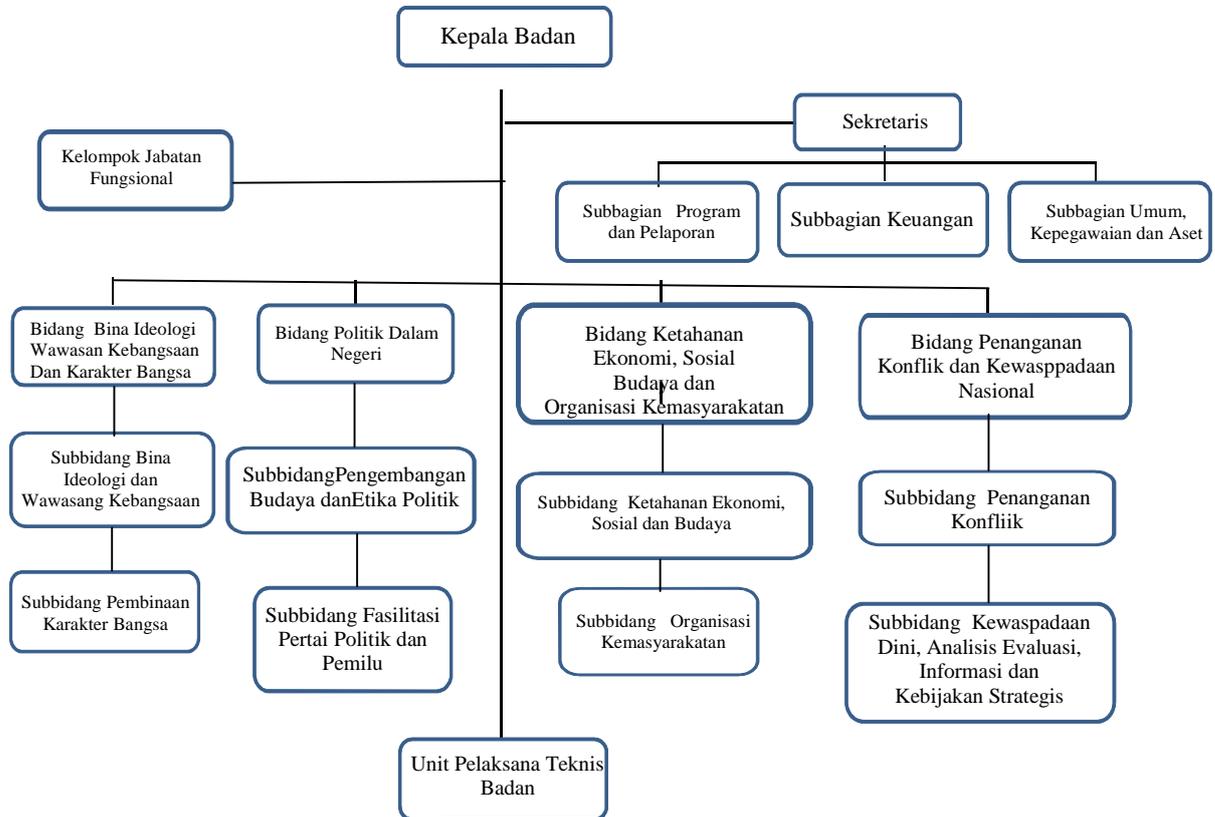
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan.
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.

- c. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- d. Pelaksanaan bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
- e. Pelaksanaan fasilitasi Parpol, Pemilukada, Ormas, LSM?NGO, pengawasan lembaga asing dan orang asing.
- f. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan organisasi kemasyarakatan.
- g. Pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesatuan bangsa dan politik.
- i. Pembinaan Unit pelaksana Teknis Badan, dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tabel 1.1

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



1.1.3. Sumber Daya

Pada akhir tahun 2017 jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh sebanyak 32 orang. Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	1	-	1	
3	IV/a	5	-	5	
4	III/d	5	6	11	
5	III/c	2	4	6	
6	III/b	2	-	1	
7	III/a	-	1	1	
8	II/d	-	-	-	
9	II/c	-	2	2	
10	II/b	2	1	3	
11	II/a	-	-	-	
12	I/c	-	-	-	
	Jumlah PNS	18	14	32	
	Non PNS				
13	Tenaga Kontrak	2	-	2	
	Jumlah Non PNS	2	-	2	
	JML PNS + NON PNS	20	14	34	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat distribusi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan golongan terbesar pada golongan III/d sebanyak 11 orang, diikuti golongan III/c sebanyak 6 orang. Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berstatus PNS dan Tenaga Kontrak.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Badan Kesbang Pol Linmas dan PB Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No.	Jabatan	Jumlah orang
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kasubbag	3
4	Kabid	4
5	Kasubbid	8
	Jumlah	17

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa jabatan eselonering yang ada sudah semua terisi,

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	4
2	S 1	22
3	D III	1
4	SLTA	5
5	SLTP	-
	Jumlah	32

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh terbanyak pada Starata 1 sebanyak 22 orang, diikuti oleh SLTA sebanyak 5 orang. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah menunjang kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja SKPD adalah ketersediaan barang inventaris dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh. Pengadaan barang-barang inventaris tersebut berasal dari dana APBK Banda Aceh dan juga atas bantuan dari pihak lain. Rincian tersebut dapat dilihat pada daftar Tabel berikut :

Tabel 1.5
Rekapitulasi Perlengkapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banda Aceh

No	Uraian	Unit
1.	Tanah	1 parsial
2.	Gedung dan Bangunan	2 unit
3.	Peralatan dan Mesin	405 unit
5.	Jaringan	- unit
6.	Aset tetap lainnya	- unit

1.2. Isu - Isu Strategis

1.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh sebagai pelaksana tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung pelaksanaan tugas
3. Belum akuratnya kualitas analisa data dan informasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai masukan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut;

Penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas.;
2. Masih Kurangnya pemahanan Aparatur tentang TUPOKSI dalam pelaksanaan tugas
3. Belum optimalnya pola koordinasi antar SKPD ,Instansi dan Lembaga terkait.

4. Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

1.2.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017, yaitu **Banda Aceh Model Kota Madani** adalah sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang publik yang luas. Disamping itu masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, inklusif, mampu bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Keadaan ini diharapkan melahirkan warga Kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, harga diri, berbudaya, dan beradab.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kota Banda Aceh merupakan suatu lembaga daerah yang melaksanakan kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam upaya pencapaian visi Badan Kesbang Pol Linmas dan PB sebagai pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik, serta perlindungan masyarakat dituangkan dalam Renstra dan Renja SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbang Pol Linmas dan PB baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Misi

Adapun misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah.
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Memperkuat ekonomi kerakyatan.
4. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami.
6. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak.
7. Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota.

1.2.3. Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Kota Banda Aceh.

Dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesbang Pol Linmas dan PB dan Renstra Kota Banda Aceh terdapat beberapa faktor penghambatan dan faktor pendorong

Adapun hambatan umum yang dijumpai baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan yang mempengaruhi kinerja pengelolaan, pendanaan dan pelayanan SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahap koordinasi, hambatan yang sering muncul adalah adanya hal-hal baru yang muncul bersamaan dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi. Untuk mengatasinya dilakukan prosedur standar yaitu melalui evaluasi dan penilaian sampai dengan ditemukannya prioritas dalam mengatasinya beserta jadwal waktu dalam menanganinya.

- b. Pada sebuah sistem kerja secara utuh maka faktor SDM sangat menentukan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Belum berkembangnya SDM dalam sebuah tim kerja akan berpengaruh terhadap efektifitas dan kualitas pekerjaan. Dari sisi ini, upaya dalam menangani hambatan yang muncul adalah dengan mengintensifkan koordinasi, mengefektifkan materi/bahan koordinasi, dan mengupayakan ketepatan waktu pekerjaan serta mengeksplorasi cara-cara baru yang lebih efektif/efisien.
- c. Pada sisi program dan kegiatan masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan pada setiap program atau kegiatan.

Sedangkan peluang yang menunjang program dan kegiatan Badan Kesbang Pol Linmas dan PB antara lain;

- 1) Adanya dukungan dari Pimpinan dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Adanya partisipasi Masyarakat dalam menjaga kantrantibmas .
- 3) Meningkatnya teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi baik dari pusat maupun daerah.
- 4) Meningkatnya dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah.
- 5) Tersedianya aparatur memadai.

1.2.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam mewujudkan Kantrantibmas yang berwawasan kebangsaan dan kerukunan beragama ditengah-tengah masyarakatl, Badan Kesbang, Pol, Linmas dan PB dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

- a. Masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan kerukunan beragama.

- b. Masih lemahnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- c. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

1.2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

1.2.5.1. Peluang

- 1) Adanya dukungan dari Pimpinan dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Adanya partisipasi Masyarakat dalam menjaga kantrantibmas.
- 3) Meningkatnya teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi baik dari pusat maupun daerah.
- 4) Meningkatnya dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah.
- 5) Tersedianya aparatur memadai.
- 6) Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung

1.2.5.2. Tantangan

- 1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia.
- 2) Lemahnya basis data menyebabkan validitas data belum optimal.
- 3) Masih belum optimalnya pemahaman masing-masing bidang dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat.
- 4) Kemajuan teknologi informasi dan tingginya tingkat partisipasi publik tidak diimbangi dengan penataan kelembagaan daerah yang lebih proporsional dan responsif sesuai dengan visi dan misi yang diembannya.

- 5) Rendahnya dukungan keuangan daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga belum dapat berjalan secara optimal.
- 6) Lemahnya Koordinasi antara SKPD dan Lembaga terkait.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pasal 6 ayat 2 disebutkan SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikembangkan bagi penyelenggaraan manajemen kinerja yakni merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan visi misi organisasi. Substansi perencanaan strategik adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan.

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis disegala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan Strategis memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta bagaimana melaksanakannya, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan hasil secara terukur

2.1. RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012-2017

Langkah penting dalam proses perencanaan strategis adalah mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan yang lebih baik, serta menyatakan hasil-hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, criteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan pelayanan public serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diimplementasikan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka **Visi** Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 adalah;

“Terwujud Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Berwawasan Kebangsaan menuju Banda Aceh Model Kota Madani”.

Yaitu keadaan yang serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan dengan maksud terciptanya kondisi

dinamis ditengah-tengah masyarakat yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka dilaksanakan misi. Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Badan Kesbang Pol Linmas dan PB sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani ikon di sisat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi Badan Kesbang Pol Linmas dan PB Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja aparatur yang Profesional
2. Membina Kesadaran Pentingnya Lingkungan Masyarakat Yang Tertib Dan Aman.
3. Membina Kesadaran Berbangsa dan Bernegara serta Kerukunan Beragama Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Membina Kesadaran Berpolitik Berdasarkan UUD 1945 Dan Pancasila.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

2.1.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kesbang Pol Linmas dan PB Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan Misi dapat dilihat pada table berikut :

1. Meningkatkan efektifitas dan profesionalisme kerja
2. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan semua instansi dan lembaga lain dalam rangka memantapkan dan memelihara keamanan dan kenyamanan
3. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam Berwawasan Kebangsaan
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembinaan dibidang Politik dan organisasi kemasyarakatan

2.1.1.2. Sasaran

1. Terlaksananya kegiatan kantor dengan efektif dan profesional
2. Peningkatan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat
3. Peningkatan pemahaman masyarakat akan bahaya Minuman keras dan narkoba

4. Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam membina kerukunan beragama
5. Peningkatan Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya wawasan kebangsaan
6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan partai politik
7. Pelaksanaan pemilu/pilkada damai

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	LSM, Ormas dan OKP terdaftar	95	174	219	259	299	339	339
2	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial	220	440	660	880	1100	1100	1100
3	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miuman Keras dan Narkoba	10	20	30	45	60	60	60
4	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kota		180	360	540	720	900	900
5	Jumlah LSM	15	15	15	15	15	15	15
6	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	1.300	1.320	1.360	1.380	1.400	1.400	1.400
7	Rasio Pos Siskamling per jumlah gampong	220	220	220	225	235	250	250

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan efektifitas dan profesionalisme kerja	Terlaksananya kegiatan kantor Dengan efektif dan profesional	Lancarnya pelayanana administrasi perkantoran.	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Tersedianya baju Pegawai	38 Stel	34 stel	34 stel	38 stel	38 stel
2	Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan semua instansi dan lembaga lain dalam rangka memantapkan dan memelihara keamanan dan kenyamanan		Terlaksananya pembinaan ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat	200 org	250 org	150 org	150 org	150 org
			Tersedianya informasi isu strategis dalam rangka stabilitas keamanan	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen
			Tersedianya data penanganan konflik sosial			4 data	4 data	4 data
			Tersedianya data			12 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen

			kewaspadaan dini masyarakat					
		Peningkatan pemahaman masyarakat akan bahaya minuman keras dan narkoba	Terlaksananya pembinaan masyarakat akan bahaya minuman keras dan narkoba	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali
3	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam berwawasan kebangsaan	Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam membina kerukunan beragama	Terlaksananya pembinaan masyarakat dalam kerukunan beragama	175 org	100 org	100 org	125 org	100 org
		Peningkatan Pemahaman Masyarakat pentingnya Wawasan kebangsaan	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	220 org	150 org	150 org	100 org	100 org
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembinaan dibidang politik dan organisasi kemasyarakatan	Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan partai politik	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan partai politik	10 doc	10 doc	10 doc	10 doc	10 doc
		Pelaksanaan pemilu/pilkada damai	Terlaksananya pelatihan satuan linmas pemilu/pilkada		1.400 org			1.400 org

Tujuan, Sasaran dan Program Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Banda Aceh
2012 – 2017

Tujuan 1. Meningkatkan efektifitas dan profesionalisme kerja

Sasaran		Program	
1	2	3	
1.1	Terlaksananya kegiatan kantor Dengan efektif dan profesional	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		1.1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan 2. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan semua instansi dan lembaga lain dalam rangka memantapkan dan memelihara keamanan dan kenyamanan

Sasaran		Program	
1	2	3	
2.1	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di lingkungan masyarakat	2.1.1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		2.1.2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
		2.1.3	Program Pemberdayaan

2.2	Peningkatan pemahaman masyarakat akan bahaya minuman keras dan narkoba	2.1.4	Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
		2.2.1	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Tujuan 3. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam Berwawasan Kebangsaan

Sasaran		Program	
1	2	3	
3.1	Peningkatan Pemahaman dan peran serta masyarakat dalam membina kerukunan bergama	3.1.1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3.2	Peningkatan Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya wawasan kebangsaan	3.2.1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Tujuan 4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembinaan dibidang politik dan organisasi kemasyarakatan

Sasaran		Program	
1	2	3	
4.1	Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan.	4.1.1	Program Pendidikan Politik Masyarakat.
4.2	Pelaksanaan Pemilu/Pilkada damai	4.2.1	Program Pendidikan Politik Masyarakat.

2.1.2. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Adapun strategi yang ditempuh yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui keikut sertaan dalam diklat teknis, diklat kepemimpinan, dan diklat fungsional.
2. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPD, lintas Pemerintahan dan lintas stakeholders lainnya.
3. Membangun kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat.
4. Melaksanakan pembinaan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, kesadaran berpolitik, ketertiban dan keamanan lingkungan menuju Banda Aceh Model Kota Madani.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan.

2.1.3. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan dan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi SKPD. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Arah kebijakan Badan Kesbang Pol Linmas dan PB tahun 2012-2017:

1. Mengikut sertakan aparatur pada kegiatan bimtek dan diklat-diklat
2. Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat Dibidang Perlindungan Masyarakat.
3. Melaksanakan Pembinaan Ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan.
4. Melaksanakan pembinaan Politik.dan organisasi kemasyarakatan
5. Melaksanakan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan umat beragama.
6. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama dengan instansi terkait.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap semua pelaksanaan kegiatan

2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2017 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renja tahun 2017 ditetapkan pada awal tahun 2017, yang memuat target kinerja atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Adminstrasi perkantoran

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

- a. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator keluaran pembayaran jasa komunikasi SDA dan listrik. Indikator hasil yang diharapkan adalah Lancarnya komunikasi, SDA dan Listrik selama 12 bulan
- b. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor. Indikator keluaran berupa pembayaran jasa kebersihan kantor. Indikator hasil yang diharapkan adalah terpeliharanya kebersihan kantor selama 12 bulan.
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Indikator keluaran Pembelian Alat Tulis Kantor. Indikator hasil yang diharapkan adalah Lancarnya kegiatan rutin kantor selama 12 bulan.
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Indikator keluaran berupa Pembayaran Barang cetakan dan penggandaan . Indikator hasil lancarnya kegiatan Administrasi Perkantoran selama 12 bulan.
- e. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Indikator keluaran berupa pembelian komponen instalasi listrik /

penerangan kantor. Indikator hasil yang diharapkan berupa lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 12 bulan .

- f. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor. Indikator keluaran berupa Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor. Indikator hasil yang diharapkan berupa Tersedianya peralatan dan keperluan kantor 12 unit.
- g. Penyediaan makanan dan minuman. Indikator keluaran berupa pembelian makan dan minum pegawai. Indikator hasil yang diharapkan adalah tersedianya makan dan minum siang pegawai selama 11 bulan.
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Indikator keluaran pembiayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Indikator hasil yang diharapkan berupa terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan.
- i. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang. Indikator keluaran berupa pembayaran jasa pelelangan / pengadaan barang dan jasa. Indikator hasil yang diharapkan terpenuhinya jasa pelelangan dan pengadaan barang dan jasa selama 6 bulan.
- j. Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran. Indikator keluaran berupa pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran. Indikator hasil yang diharapkan berupa lancarnya pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional. Indikator keluaran pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. Indikator hasil yang diharapkan berfungsinya kendaraan dinas / operasional selama 12 bulan .
- b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan & Perlengkapan Gedung Kantor. Indikator keluaran pemeliharaan Peralatan kantor. Indikator hasil yang diharapkan berfungsinya peralatan kantor selama 12 bulan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

Pengadaan Pakaian Dinas Harian, Indikator keluaran jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan, Indikator hasil yang diharapkan tersedianya pakaian dinas sebanyak 38 stel.

4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Indikator keluaran berupa jumlah dokumen penanganan konflik sosial, dengan Indikator hasil yang diharapkan tersedianya data penanganan konflik social sebanyak 4 dokumen.

5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah: Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA). Indikator keluaran berupa jumlah dokumen Kominda. Indikator hasil yang diharapkan tersedianya informasi isu strategis dari instansi terkait sebanyak 18 dokumen.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

- a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. Indikator keluaran berupa jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan umat beragama. Dengan indikator hasil yang diharapkan meningkatnya jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan umat beragama sebanyak 100 orang.
- b. Peningkatan rasa solidaritas dan Ikatan sosial dikalangan masyarakat. Indikator keluaran berupa jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dikalangan masyarakat, dengan Indikator hasil yang diharapkan meningkatnya rasa solidaritas dan rasa social dikalangan siswa dan siswi sebanyak 140 orang.
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa Indikator keluaran berupa jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pemahaman bela Negara dan pemantapan nilai-nilai pancasila, dengan Indikator hasil yang diharapkan meningkatnya jumlah peserta yang mengikuti

sosialisasi pemahaman bela Negara dan pementapan nilai-nilai pancasila sebanyak 100 orang.

- d. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan Indikator keluaran berupa jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi /diskusi nilai-nilai pembauran kebangsaan, dengan Indikator hasil yang diharapkan meningkatnya pemahaman peserta tentang pentingnya nilai-nilai pembauran kebangsaan sebanyak 100 orang.

7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah: Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba. Indikator keluaran berupa jumlah penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, dengan Indikator hasil yang diharapkan berupa meningkatnya jumlah peserta yang mengikuti jumlah penyuluhan terhadap bahaya narkoba sebanyak 15 kali.

8. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

- a. Penyuluhan kepada masyarakat Indikator keluaran berupa jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik masyarakat, dengan indikator hasil yang diharapkan berupa meningkatnya pemahaman peserta yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik untuk masyarakat sebanyak 75 orang.

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Indikator keluaran berupa jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan indikator hasil yang diharapkan berupa tersedianya data dan informasi Parpol, Ormas dan LSM sebanyak 10 dokumen.

9. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah; Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), indikator keluaran berupa jumlah dokumen kantramtibmas bencana alam dan bencana karena ulah manusia, dengan indikator keluaran tersedianya informasi dan data kamtrantibmas bencana alam dan bencana karena ulah manusia sebanyak 12 dokumen

2.3. Perjanjian Kinerja

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pasal 9 disebutkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahu tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang akan dikelolanya. Tujuan perjanjian

kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan reward and punishment.

Penyusunan perjanjian kinerja Badan Kesbang Pol Linmas dan PB Kota Banda Aceh berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja Badan Kesbang Pol Linmas dan PB Kota Banda Aceh Tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbang Pol Linmas dan PB Kota Banda Aceh periode 2012-2017 dan memperhatikan program, kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun 2016 sebesar Rp. 4.188.114178,-

Target Indikator Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasarannya.

Sasaran strategis dan target indikator kinerja Badan Kesbang Pol Linmas dan PB Kota Banda Aceh tahun 2016 ditetapkan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Badan Kesbang Pol Linmas dan PB Kota Banda Aceh pada Januari 2016, sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESBANG POL LINMAS DAN PB KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2016**

MISI I :

Meningkatkan Kinerja Aparatur yang Profesional

Sasaran Strategis :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terlaksananya Kegiatan Kantor dengan Efektif dan Profesional	1.	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan
	2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan
	3.	Tersedianya Baju Pegawai Badan Kesbang Pol dan Linmas	38 Stel

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 1, diarahkan melalui pelaksanaan 3 program dan 13 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 551.182.133,- dengan rincian sebagai berikut;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp 486.185.633,- untuk 10 Kegiatan dengan target 12 Bulan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp 47.896.500,- untuk 2 Kegiatan dengan target 12 bulan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran sebesar Rp 17.100.000,- untuk 1 Kegiatan dengan target 38 stel

MISI 2 :

Membina Kesadaran Pentingnya Lingkungan Masyarakat yang tertib dan aman

Sasaran Strategis 1 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di lingkungan masyarakat	1.	Tersedianya Informasi isu strategis dalam rangka stabilitas keamanan	18 Dokumen
	2.	Tersedianya data penanganan konflik sosial	4 Data
	4.	Tersedianya data kewaspadaan dini masyarakat	12 Dokumen

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 1, diarahkan melalui pelaksanaan 3 program dan 3 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 239.101.480,- dengan rincian sebagai berikut;

1. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan dengan anggaran sebesar 53.673.000,- unuk 1 kegiatan dengan target 4 data
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan anggaran sebesar.... Rp 114.210.000,- untuk 1 kegiatan dengan target 18 Dokumen.

3. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan anggaran sebesar.... Rp 71.218.480,- untuk 1 kegiatan dengan target 12 Dokumen

Sasaran Strategis 2 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Peningkatan Pemahaman Masyarakat akan bahaya minuman keras dan narkoba	1.	Terlaksananya pembinaan masyarakat akan bahaya minuman keras dan narkoba	15 Kali

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 1, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut;

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dengan anggaran sebesar.... Rp 72.502.000,- untuk 1 kegiatan dengan target 15 kali dan 50 orang

MISI 3 :

Membina Kesadaran Berbangsa dan Bernegara serta Kerukunan Beragama dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sasaran Strategis 1 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam membina kerukunan beragama	1.	Terlaksananya pembinaan masyarakat dalam kerukunan beragama	100 orang

Sasaran Strategis 2 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Peningkatan pemahaman masyarakat pentingnya wawasan kebangsaan	1.	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	340 orang

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis ini ,diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 4 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 193.091.300,- dengan rincian sebagai berikut;

Program Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan;

1. Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dengan anggaran sebesar Rp. 125.093.000,- serta target 100 orang
2. Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.25.807.300,- serta target 140 orang
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa dengan anggaran sebesar Rp.20.893.000,- serta target 100 orang
4. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah Rp.21.298.000,- serta target 100 orang

MISI 4 :

Membina Kesadaran Berpolitik berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila yang Profesional

Sasaran Strategis :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan partai politik	1.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan partai politik	75 orang 10 Dokumen

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 2 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 180.663.000,- dengan rincian sebagai berikut;

Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan;

1. Penyuluhan Kepada Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 115.655.000,- serta target 75 orang
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 65.008.000,- serta target 10 Dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, mendefinisikan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh selaku pelaksana kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh di bidang kesatuan bangsa dan politik, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra periode 2012-2017 maupun RKT Tahun 2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai kinerja baik keberhasilan-

keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

3.1. Capaian Kinerja

Mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah, kinerja Kota Banda Aceh diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis dilakukan melalui media perjanjian/penetapan kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya dalam hal ini pengukuran kinerja.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran melalui media pengukuran kinerja sebagaimana terlampir pada formulir pengukuran kinerja, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh melakukan pengukuran indikator kinerja sasaran berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Perjanjian/ Penetapan Kinerja tahun 2017 dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Melalui pengukuran kinerja dapat diketahui telah sejauh mana keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam merealisasikan target jangka menengah dan juga sebagai media

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang diarahkan mendukung tercapainya tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh yang akan berimplikasi terhadap suksesnya visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasilnya diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan.

Untuk mengukur pencapaian sasaran, digunakan indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut. Adapun indikator kinerja yang digunakan terdiri dari indikator output dan outcome. Pemilihan indikator tersebut dengan pertimbangan signifikansi (measurability) dari indikator yang bersangkutan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam LAKIP ini adalah indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra yang merupakan keluaran penting dan hasil

LAKIP tahun 2017 disusun dengan mengukur capaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang dituangkan dalam rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh. Rencana Strategis hanya dijabarkan hingga program, dengan maksud agar setiap kegiatan yang hendak dilakukan dapat lebih disesuaikan dengan lingkungan. Setiap sasaran dan indikatornya dianggap mempunyai hubungan sebab akibat dengan berbagai kegiatan pendukungnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2017. Uraian target dan realisasi dari sasaran dan kegiatan secara terperinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan formulir Pengukuran Kinerja (PK)

Tahun 2017, implementasi rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh mencakup pelaksanaan 9 program dengan 23 kegiatan untuk mendukung terwujudnya 6 sasaran strategis.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran kinerja (pada form PK) sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Banda Aceh, maka pencapaian Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbang Pol dan Linmas tahun anggaran 2017 telah tercapai

Adapun pencapaian kinerja tersebut meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut;

MISI I :

Meningkatkan Kinerja Aparatur yang Profesional

Sasaran Strategis :

Sasaran	No	Indikator Kinerja			Capaian Kinerja
		Uraian	Target	Realisasi	
Terlaksananya Kegiatan Kantor dengan Efektif dan Profesional	1.	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100 %
	2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	12 bulan	100 %
	3.	Tersedianya Baju Pegawai	38 Stel	38 Stel	100 %

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis ini diarahkan melalui pelaksanaan 3 program dan 13 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 551.182.133,- dan direalisasi sebesar Rp.505.478.912,- (91,70 %) adapun rincian sebagai berikut;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp 486.185.633,- dan realisasi sebesar Rp. 455.191.687,- (93,63%)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp 47.896.500,- dan realisasi sebesar Rp. 33.387.225,- (69,71%).
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran sebesar Rp 17.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 16.900.000,- (98,83%)

MISI 2 :

Membina Kesadaran Pentingnya Lingkungan Masyarakat yang tertib dan aman

Sasaran Strategis 1 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja			Capaian Kinerja
		Uraian	Target	Realisasi	
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di lingkungan masyarakat	1.	Tersedianya informasi isu strategis dalam rangka stabilitas keamanan	18 Dokumen	18 Dokumen	100 %
	2.	Tersedianya data penanganan konflik sosial	4 Data	4 Data	100 %
	3.	Tersedianya data Kewaspadaan dini masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis ini, diarahkan melalui pelaksanaan 3 program dan 3 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan direncanakan sebesar Rp. 239.101.480,-

dan realisasi sebesar Rp. 235.573.980,- (98,52 %) dengan rincian sebagai berikut;

1. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan dengan anggaran sebesar 53.673.000,- dan realisasi sebesar Rp. 52.945.500,- (98,64%).
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan anggaran sebesar.... Rp 114.210.000,- dan realisasi sebesar Rp.111.410.000,- (97,55%).
3. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan anggaran sebesar.... Rp 71.218.480,- dan realisasi sebesar Rp.70.009.230,- (98,30%)

Sasaran Strategis 2 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja			Capaian Kinerja
		Uraian	Target	Realisasi	
Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya minuman keras dan narkoba	1.	Terlaksananya pembinaan masyarakat akan bahaya minuman keras dan narkoba	15 Kali	15 Kali	100 %

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis ini, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut;

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dengan anggaran sebesar... Rp 72.502.000,- dan realisasi sebesar Rp.69.216.000,- (95,47)

MISI 3 :

Membina Kesadaran Berbangsa dan Bernegara serta Kerukunan Beragama dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sasaran Strategis 1 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja			Capaian Kinerja
		Uraian	Target	Realisasi	
Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam membina kerukunan beragama	1.	Terlaksananya pembinaan masyarakat dalam kerukunan beragama	100 orang	100 orang	100 %

Sasaran Strategis 2 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja			Capaian Kinerja
		Uraian	Target	Realisasi	
Peningkatan pemahaman masyarakat pentingnya wawasan berkebangsaan	1.	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	340 orang	340 orang	100 %

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada ke 2 (dua) sasaran strategis ini, diarahkan melalui pelaksanaan program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar

Rp. 193.091.300,- dan realisasi sebesar Rp. 189.535.800,- (98,15%) dengan rincian sebagai berikut;

Program Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan;

1. Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dengan anggaran sebesar Rp. 125.093.000,- dan realisasi sebesar Rp. 123.410.500,- (98,66%)
2. Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.25.807.300,- dan realisasi sebesar Rp. 25.307.300,- (98,06%)
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa dengan anggaran sebesar Rp.20.893.000,- dan realisasi sebesar Rp.19.520.000,- (93,43%)
4. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah Rp.21.298.000,- dan realisasi sebesar Rp. 21.298.000,- (100%)

MISI 4 :

Membina Kesadaran Berpolitik berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila yang Profesional

Sasaran Strategis :

Sasaran	No	Indikator Kinerja			Capaian Kinerja
		Uraian	Target	Realisasi	
Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan partai politik	1.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan	75 orang	75 orang	100 %
		terhadap organisasi kemasyarakatan dan partai politik	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada ke 2 (dua) sasaran strategis ini diarahkan melalui pelaksanaan program Pendidikan Politik Masyarakat dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 180.663.000,- dan realisasi sebesar Rp. 164.713.000,- (91,17%) dengan rincian sebagai berikut;

Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan;

3. Penyuluhan Kepada Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 115.655.000,- dan realisasi sebesar Rp. 103.255.000,- (89,28%)
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 65.008.000,- dan realisasi sebesar Rp.61.458.000,- (94,54%)

Untuk perbandingan pencapaian kinerja pada tingkat sasaran strategis antara tahun 2017 dan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.1.

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 DAN TAHUN2015

No	Sasaran	Capaian sasaran 2016 (%)	Capaian sasaran 2017 (%)	Peningkatan (Penurunan) Capaian (%)
1.	Terlaksananya Kegiatan Kantor dengan Efektif dan Profesional	100 %	100 %	-
2	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di lingkungan masyarakat	100 %	100 %	-
3	Peningkatan pemahaman masyarakat akan bahaya	100 %	100 %	-

	minuman keras dan narkoba			
4	Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam membina kerukunan beragama	100 %	100 %	-
5	Peningkatan pemahaman masyarakat pentingnya wawasan kebangsaan	100 %	100 %	-
6	Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan partai politik	100 %	100 %	-

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam dokumen Renstra dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

Tabel.3.2.

**REALISASI AKUMULASI TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN
2016**

No	Sasaran/Indikator	Realisasi akumulasi sd Tahun 2017 (%)	Target capaian sesuai dengan Renstra Tahun 2017 (%)	Persentase capaian kinerja(%)
1.	Terlaksananya Kegiatan Kantor dengan Efektif dan Profesional			
	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan	60 bulan	100
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	60 bulan	60 bulan	100
	Tersedianya baju pegawai	38 stel	38 stel	100

2	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di lingkungan masyarakat			-
	Tersedianya informasi isu strategis dalam rangka stabilitas keamanan	90 dokumen	90 dokumen	100
	Tersedianya data penanganan konflik sosial	12 data	12 data	100
	Tersedianya data kewaspadaan dini masyarakat	36 dokumen	36 dokumen	100
3	Peningkatan pemahaman masyarakat akan bahaya minuman keras dan narkoba			-
	Terlaksananya pembinaan masyarakat akan bahaya minuman keras dan narkoba	100 kali	75 kali	133
4	Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam membina kerukunan beragama			
	Terlaksananya pembinaan masyarakat dalam kerukunan beragama kebangsaan	900 orang	600 orang	150
5	Peningkatan pemahaman masyarakat pentingnya wawasan kebangsaan			
	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	1.220 orang	720 orang	169
6	Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan partai politik			-
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan partai politik	75 orang 50 Dokumen	75 orang 50 Dokumen	100 100

3.1.1. Kendala Pelaksanaan Kegiatan

Dalam memenuhi target capaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan masih menghadapi berbagai hambatan/kendala antara lain;

1. Masih rendahnya SDM pegawai yang dalam memahami tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang dimiliki
2. Keterbatasan sumber daya aparatur yang menguasai IT
3. Kurangnya sarana dan prasarana kerja
4. Belum memadainya anggaran baik untuk pemeliharaan peralatan kantor maupun kegiatan lainnya, sehingga peralatan kantor yang rusak berat tidak bisa dilakukan perbaikan dan kegiatan-kegiatan lainnya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
4. Masih lemahnya pemahaman Lembaga/Institusi/SKPD lainnya terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Kesbang,Pol, Linmas dan PB.
5. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD

3.1.2 Strategi Pemecahan Masalah

Dengan dijumpainya beberapa kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya, Badan Kesatuab Bangsa Kota Banda Aceh melakukan berbagai upaya untuk strategi pemecahan masalah tersebut sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan yang bermasalah tersebut akan kembali berjalan lancar. Adapun Strategi pemecahan masalah tersebut antara lain;

1. Berharap kepada Walikota dan DPRK dapat mengalokasikan dana yang memadai untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak baik ringan maupun berat dapat terlaksananya program yang telah ditetapkan.
2. Adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna memenuhi capaian target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga /Institusi / SKPD lainnya agar lebih memahami terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Adanya pelatihan-pelatihan untuk peningkatan SDM yang berhubungan dengan IT.
5. Meningkatkan koordinasi antar SKPD

Hasil dari berbagai sasaran, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017, belum secara tuntas dan menyeluruh mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh menyusun anggaran program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian dari target sasaran sehingga dapat dicapai hasil yang optimal sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kinerja pemerintah tahun 2016. Realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh untuk mewujudkan pencapaian sasaran diatas adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.2

Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Prosentase
1	Terlaksananya Kegiatan Kantor dengan efektif dan profesional	551.182.133,-	505.478.912,-	91,70 %
2.	Peningkatan Ketertiban dan keamanan dilingkungan masyarakat	235.573.980,-	239.101.480,-	98,52 %
3	Peningkatan pemahaman masyarakat akan bahaya minuman keras dan narkoba	72.502.000,-	69.216.000,-	95,47 %
4	Peningkatan Pemahaman dan peran serta masyarakat dalam membina kerukunan beragama	125.093.000,-	123.410.500,-	98,66 %
5	Peningkatan Pemahaman masyarakat pentingnya wawasan kebangsaan	67.998.300,-	66.125.300,-	97,24 %
6	Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan partai politik	180.663.000,-	164.713.000,-	91,17 %

Tabel 3.2.1

Target dan realisasi anggaran program dan kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran DPA (Rp)	Anggaran DPPA(Rp)	Realisasi	Prosentase
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	o Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.641.000,-	67.985.046,-	49.429.610,-	72,71 %
	o Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.418.180,-	-	5.418.180,-	100 %
	o Penyediaan Alat Tulis Kantor	34.483.247,-	-	34.301.997,-	99,47 %
	o Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.471.900,-	-	8.471.900,-	100 %
	o Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.544.500,-	-	2.544.500,-	100 %
	o Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	97.294.760,-	104.944.760,-	100.467.500,-	95,73 %
	o Penyediaan makanan dan minuman	72.358.000,-	-	66.378.000,-	91,74 %
	o Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.000.000,-	147.500.000,-	147.500.000,-	100 %
	o Penyediaan Jasa Pelelangan/ Pengadaan Barang	4.200.000,-	-	2.400.000,-	57,14 %
	o Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	38.280.000,-	-	38.280.000,-	100 %
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
	o Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	34.628.000,-	-	23.980.925,-	69.25 %

	kantor				
	o Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	13.268.500,-	-	9.406.300,-	70,89 %
3	Peningkatan disiplin aparatur				
	o Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	15.200.000,-	17.100.000,-	16.900.000,-	98,83 %
4	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				
	o Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	53.673.000,-	-	52.945.500,-	98,64 %
5	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal				
	o Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	114.210.000,-	-	111.410.000,-	97,55 %
6	Pengembangan Wawasan Kebangsaan				
	o Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	125.093.000,-	-	123.410.500,-	98,68 %
	o Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	25.807.300,-	-	25.307.300,-	98,06 %
	o Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	27.393.000,-	20.893.000,-	18.520.00,-	93,43 %
	o Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah	21.298.000,-	-	21.298.000,-	100 %
7	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)				
	o Penyuluhan pencegahan peredaran/	120.302.000,-	72.502.000,-	69.216.000,-	95,47 %

	penggunaan minuman keras dan narkoba				
9	Program Pendidikan Politik Masyarakat				
	o Penyuluhan Kepada Masyarakat	67.830.000,-	115.555.000,-	103.255.000,-	89,28 %
	o Monitoring, evaluasi dan pelaporan	59.008.000,-	65.008.000,-	61.458.000,-	94,54 %
10	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alama				
	o Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	71.218.480,-	-	70.009.230,-	98,30 %

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholders kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan laporan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan SKPD dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi yang tertuang dalam RPJM Kota Banda Aceh.

Pedoman penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dalam periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Tujuan penyusunan laporan ini untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Polisi Kota Banda Aceh tahun 2017 memuat laporan kinerja yang telah dicapai selama tahun 2017. Dalam pelaksanaan kinerja terdapat berbagai kendala yang dihadapi mengakibatkan pencapaian tidak optimal antara lain aparatur masih ada yang belum memahami tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang dimilikinya, keterbatasan anggaran,

sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, sehingga dapat dikatakan pencapaian sasaran dengan ukuran seperti angka – angka tersebut diatas cukup memberikan kebanggaan kepada kita yang pada hakekatnya merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh tahun 2017 ini, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan ditahun mendatang sangat kami harapkan.

Oleh karena itu penyempurnaan strategi dimasa yang akan datang perlu dilaksanakan terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan. Dengan menyempurnakan mekanisme perencanaan diharapkan penyusunan rencana kinerja tahunan melalui berbagai program dan kegiatan benar-benar dapat terlaksana, sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai semaksimal mungkin.

Akhirnya, semoga LAKIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

Banda Aceh, Januari 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH

Drs.Tarmizi Yahya, MM

Pembina Utama Muda/Nip.19620113 198607 1 001